



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

**PENYAMPAIAN PANDANGAN PEMERINTAH  
ATAS  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
PENDIDIKAN DAN LAYANAN PSIKOLOGI DENGAN PEMERINTAH**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Salam sejahtera bagi kita semua,  
Om swastiastu,  
Namo buddhaya,  
Salam kebajikan,  
Rahayu

Yang saya hormati,  
Ketua Komisi X DPR RI, Bapak Syaiful Huda,  
Wakil Ketua Komisi X: Ibu Agustina Wilujeng Pramestuti, Ibu Hetifah Syaifudian, Bapak Dede Yusuf, Bapak Abdul Fikri,  
Serta seluruh anggota Komisi X DPR RI,  
Ibu dan Bapak pimpinan di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial yang hadir dalam rapat kerja ini.

Pertama, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu dan Bapak sekalian, saya tidak dapat menghadiri pertemuan ini secara fisik dikarenakan kondisi saya yang kurang sehat.

Ibu dan Bapak yang saya hormati,  
Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Komisi X DPR RI, terutama Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi yang dipimpin oleh Ibu Hetifah, atas tuntasnya pembahasan RUU ini.

Lahirnya Undang-undang Pendidikan dan Layanan Psikologi saya yakin akan mendukung visi nasional dalam mewujudkan SDM yang berkualitas. Sebab peraturan ini akan membantu generasi

muda kita dalam mengembangkan minat dan potensinya secara maksimal dengan dukungan psikolog yang profesional dan bertanggung jawab.

Dan untuk mewujudkan psikolog yang profesional dan bertanggung jawab, kita membutuhkan pembaruan Pendidikan Psikologi yang terencana, terarah, dan berkesinambungan; serta pengelolaan layanan psikologi yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum pada klien maupun profesi psikologi.

Semua itu telah diatur dengan baik dalam RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi. Oleh karena itu, kami di Kemendikbudristek mendukung penuh finalisasi dan implementasi Undang-undang ini ke depannya, sebagai kelanjutan dari dukungan kami selama proses penyusunan.

Selama proses penyusunan, kami telah memberikan dukungan kepada Panja dari Komisi X dengan melakukan koordinasi bersama pihak pemerintah yang mendapatkan amanat dari Bapak Presiden Joko Widodo untuk membahas RUU ini, yakni Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, draf RUU juga telah dibahas bersama sejumlah organisasi profesi Psikolog dan perguruan tinggi penyelenggara Pendidikan Psikologi. Pelibatan berbagai unsur dalam proses penyusunan dan pembahasan telah memberikan banyak masukan berharga yang memperkaya aturan ini.

Keputusan untuk mengganti judul dari yang semula RUU tentang Praktik Psikologi menjadi RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi merupakan hal yang baik karena membuat aturan ini semakin komprehensif, serta dapat menyelaraskan proses pendidikan dengan praktik profesional yang dijalani oleh psikolog.

Dengan adanya keselarasan tersebut, RUU ini juga memberikan peran yang seimbang antara perguruan tinggi penyelenggara Pendidikan Psikologi, organisasi profesi yang menjaga marwah profesi psikolog, serta pemerintah sebagai regulator dan fasilitator dalam perwujudan layanan psikologi yang berkualitas dan merata aksesnya. Di samping itu, RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi juga berhasil melakukan penyelarasan dengan Undang-undang Kesehatan yang telah terlebih dahulu mengatur praktik psikolog di fasilitas layanan kesehatan.

Selain itu, pengayaan yang juga tidak kalah penting adalah penjelasan atas hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban klien dan psikolog dalam konteks layanan. Sehingga RUU ini mampu memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi masyarakat serta para psikolog dalam mengakses dan menyediakan layanan psikologi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan ini kami atas nama pemerintah menyetujui RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat II di sidang Paripurna DPR RI.

Ibu dan Bapak yang saya hormati,

Sebagai langkah tindak lanjut, kami akan melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah dalam penyusunan peraturan pemerintah sebagai kebijakan turunan dari Undang-undang ini. Pemerintah akan mengajak para pemangku kepentingan, terutama organisasi-organisasi profesi dan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan psikologi untuk menyusun peraturan turunan dan mengimplementasikannya dengan seoptimal mungkin.

Sekali lagi saya ucapkan selamat atas hasil kerja keras dan kolaborasi antara Komisi X DPR RI dengan pemerintah dalam penyusunan RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi. Tentunya kita semua berharap RUU ini dapat segera diundangkan dan diimplementasikan guna mendukung upaya kita mewujudkan SDM unggul untuk Indonesia Maju.

Terima kasih,

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Om shanti, shanti, shanti, om

Namo buddhaya.

Jakarta, 30 Juni 2022

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Nadiem Anwar Makarim